

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri. LKjIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang telah tersusun ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Tahun 2018 merupakan perwujudan pelaksanaan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tahun Ketiga.

LKjIP Dinas PPKB dan P3A Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dinas PPKB dan P3A telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, Februari 2019

KEPALA

Pt.DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

Dra HARTUTININGSIH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19610824 199203 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2018 adalah tahun Ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri kurun waktu Tahun 2016 s/d 2021, hal ini merupakan tolok ukur untuk mengetahui peningkatan kinerja selama lima tahun kedepan.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri secara bertahap bermaksud mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kesenjangan Gender Dan Perlindungan Anak, hal tersebut sebagaimana visi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s/d 2021.

Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah “Menekan angka kelahiran, meningkatkan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender di berbagai bidang serta meningkatkan kualitas hidup anak dan perempuan”.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, maka terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan 2 (dua) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan yaitu :

1. Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk.
Dengan indikator dan target yang harus dicapai tahun 2018 yaitu :
 - a. Laju pertumbuhan Penduduk, target 0,29%
2. Meningkatnya Peserta KB Aktif MKJP.
Dengan indikator dan target yang harus dicapai tahun 2018 yaitu :
 - a. Cakupan KB Aktif, target 79,60%
 - b. Unmetneed, target 9%
3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan.
Dengan indikator dan target yang harus dicapai tahun 2018 yaitu :
 - a. Persentase penurunan kekerasan terhadap Perempuan, target 12,50%
 - b. Rasio Partisipasi Perempuan, target 0,055
4. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak.
Dengan indikator dan target yang harus dicapai tahun 2018 yaitu :
 - a. Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak, target 26,67%.
 - b. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak, target Pratama.

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan dengan total anggaran untuk membiayai pelaksanaan kedua Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tersebut sebesar Rp 16.062.554.284,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.199.544.695,- atau sebesar 63,50% dari anggaran serta secara fisik kegiatan sebagian besar telah terealisasi 100%.

Sebagaimana pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian kinerja yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2018 secara keseluruhan dikategorikan **SANGAT TINGGI** dengan rata-rata pencapaian kinerja 197% . Untuk pencapaian indikator masing-masing sasaran pada tahun 2018 dan dibandingkan dengan realisasi Anggaran yang mendukung pencapaian masing-masing Sasaran sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya pencapaian **Sasaran -1 Meningkatnya pengendalian laju penduduk** sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya hanya 1 (satu) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 7.620.449.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.514.573.820,- , ternyata dalam pelaksanaannya telah secara maksimal menunjang pencapaian indikator kinerja pada Sasaran-1 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja pada indikator untuk Sasaran -1 yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,29% yang hanya tercapai 1,18% atau terealisasi sebesar 503% dari target. Hal ini karena dasar penghitungannya yang berbeda.
- b. Pencapaian Sasaran -2 Meningkatnya Peserta KB MKJ yang didukung dari dilaksanakan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan total seluruh Anggaran sebesar Rp. 1.271.292.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.247.375.006,-, dengan pencapaian Kinerja rata-rata sebesar 97,03% untuk ke dua indikator kinerja yang masih berada dibawah target.

Hal ini disebabkan bukannya tidak berhasil program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Wonogiri tahun 2018 tetapi karena adanya penyesuaian data hasil pendataan yang telah dikoreksi dari BKKBN Pusat terkait pengakuan Peserta KB Baru murni yang selama ini masih ada pengakuan Peserta KB Baru dari Ganti Cara, maka yang ini harus dikeluarkan maka terjadi penurunan pencapaian Cakupan Peserta KB Aktif sedangkan untuk Unmetneed juga terjadi penyesuaian data yang ada dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih tercatat karena proses koreksi terhenti saat penggunaan sistem informasi pendataan yang baru dari pusat masih terus perbaikan, maka belum terkoreksi jumlah PUS yang seharusnya ada. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap penghitungan yang kumulatif setiap tahunnya. Secara capaian kinerja Sasaran -2 pada tahun 2018 kedua indikator tersebut diatas mengalami kenaikan dibanding tahun 2017.

- c. Pencapaian **Sasaran -3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan** didukung dengan 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan dengan total Anggaran Rp. 464.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 395.774.496,- rata-rata pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sebesar 322,5% atau capaian targetnya sangat tinggi. Karena pada tahun 2018 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan lebih sedikit dibanding tahun 2017.
- d. Pencapaian **Sasaran -4 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak** yang tidak terlepas dari pelaksanaan 1 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 50.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.. 48.302.156,- dengan rata-rata pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sebesar 43,18%. Hal ini karena pada indikator kinerja Persentase penurunan kekerasan terhadap anak tercapai sebesar 177% yang menunjukan dibanding tahun 2017 jumlah kekerasan terhadap anak lebih sedikit pada tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur didalamnya mengenai Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A) sesuai Tugas dan Fungsinya diberikan amanah untuk melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keseluruhan urusan wajib non pelayanan dasar tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat Wonogiri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada Umumnya.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A tidak dapat lepas dari manusia mulai perencanaan usia perkawinan, kelahiran, Anak, Remaja, usia produktif sampai lansia, semuanya untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri setiap tahun yang harus dipertanggungjawabkan baik penggunaan dananya maupun hasil yang telah dicapai dalam menggunakan dana dimaksud untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah diberlakukan maka untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak bisa lepas dari proses perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi untuk perbaikan kedepan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sebagaimana telah di Reviu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2018 Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selanjutnya fungsi dan tugas Dinas PPKB dan P3A pada organisasi terendah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi :

(a) pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di

lingkungan Dinas; (c) pengkoodinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; (d) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; (f) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas; dan (g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun **Sekretariat** , terdiri dari 2 sub bagian, yaitu :

a.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan perencanaan, dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.

a.2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.

b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi: (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam

penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi, yaitu :

b.1. Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengendalian penduduk yang meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

b.2.Seksi Keluarga Berencana, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang keluarga berencana yang meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

c.Bidang Keluarga Sejahtera

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan

kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi, yaitu :

c.1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pembangunan keluarga yang meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

c.2 Seksi Pemberdayaan Keluarga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

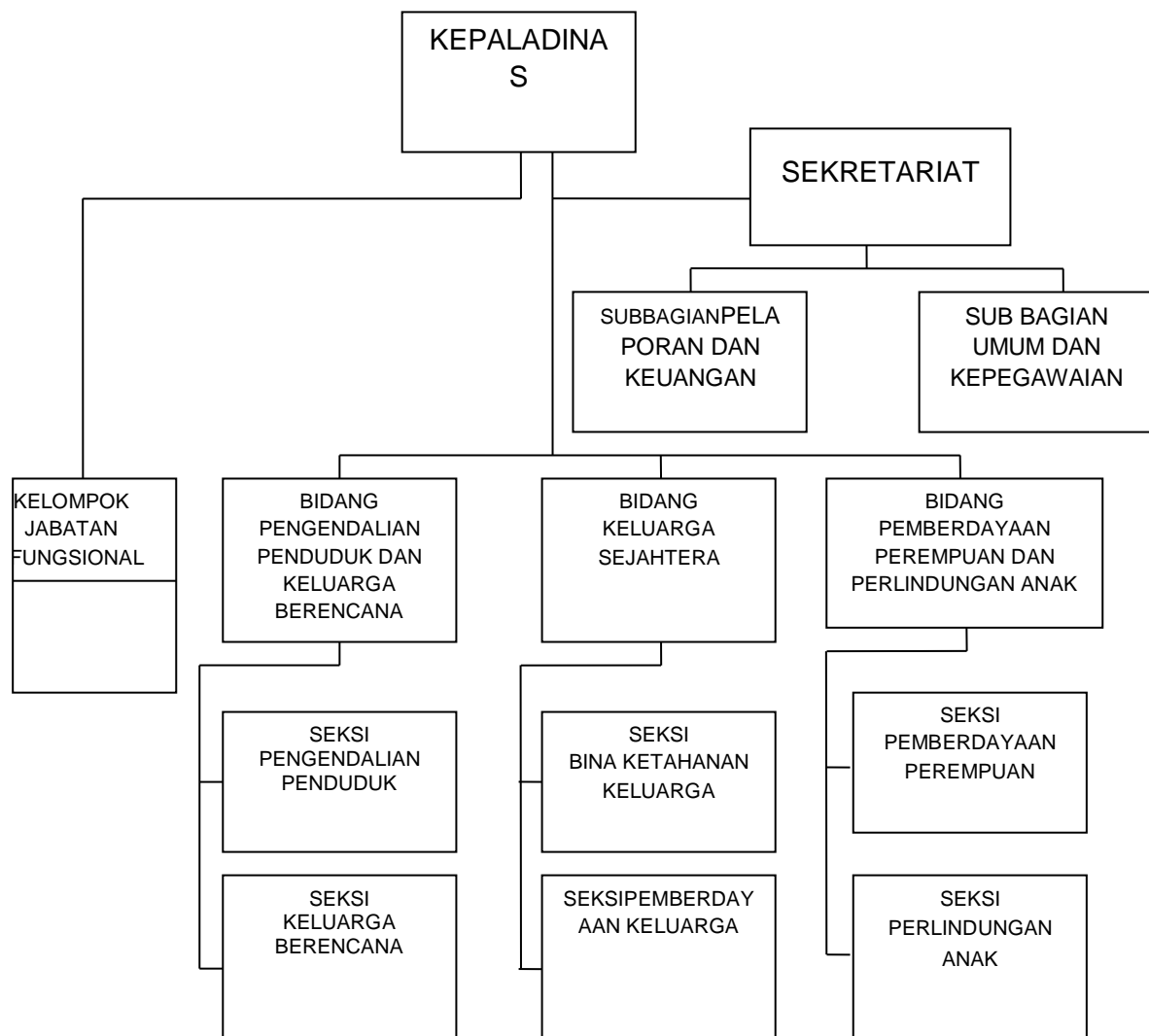
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , membawahi 2 seksi , yaitu :

d.1. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi,

evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan; perlindungan perempuan; kualitas keluarga; dan sistem data gender dan anak.

d.2. Seksi Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang perlindungan anak melalui Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 seksi. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A

E. Isu Strategis

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Permasalahan :

- a. Sumber data yang masih berubah-ubah atau belum pasti, contoh untuk pengolahan data laju pertumbuhan penduduk yang pada awalnya menggunakan data pelayanan berubah menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari disdukcapil.
- b. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana lini lapangan Program KKBPK dengan kondisi tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana yang hanya berjumlah 73 orang terdiri dari 32 PLKB dan 41 Pembantu PLKB. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 4.
- c. Belum pahamnya tentang regulasi aturan yang baru.

2. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sumber data yang lebih pasti.
- b. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
- c. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui Kampung KB.
- e. Mengirimkan pendidikan formal dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun BKKBN Pusat.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
- g. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan berkesinambungan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja :
 - a. Masih kurangnya komitmen dari pemegang kebijakan, untuk menyediakan data gender dan anak sebagai data angka untuk melihat isu gender yang ada di kabupaten Wonogiri;
 - b. Kurangnya Sinergitas antara Stakeholder/pemegang kebijakan dalam masalah penanganan khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Masih kurangnya komitmen antara stakeholder untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
2. **Adapun alternatif solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Koordinasi berkala antar pemegang kebijakan dan membuat komitmen untuk membuat data gender dan anak, agar dapat melihat isu

gender yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga bisa diatasi dengan cepat dan tepat sasaran;

- b. Meningkatkan koordinasi secara berkala antar stakeholder/pemegang kebijakan untuk melakukan penanganan kasus dari proses awal sampai proses pemulihan Psiko sosial sesuai dengan kebutuhan korban.
- c. Meningkatkan koordinasi antar pemegang kebijakan untuk membuat komitmen dan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
- d. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Kaukus Perempuan;

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri ada 7 (tujuh) Isu Strategik yaitu :

1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
 - b. Terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan;
 - d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
 - b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi;
 - c. Informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama antara Bupati dengan Kepala Badan/Dinas/Instansi yang merupakan kontrak kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2018 telah melakukan

Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonogiri untuk mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,29
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	Cakupan KB aktif	Persen	76,60
		Unmetneed	Persen	9
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	Persen	12,50
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.055
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak	Persen	26,67
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.	1.392.068.500	APBD KAB
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp.	125.825.000	APBD KAB
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR	Rp.	12.241.000	APBD KAB

	PROGRAM		ANGGARAN	KET
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp.	22.500.000	APBD KAB
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp.	56.681.000	APBD KAB
6.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Rp.	50.400.000	APBD KAB
7.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Rp.	396.578.000	APBD KAB
8.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	9.000.000	APBD KAB
9.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Rp.	59.094.000	APBD KAB
10.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Rp.	7.620.449.000	APBD KAB DAN APBN
11.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Rp.	65.880.000	APBD KAB
12.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Rp.	56.305.000	APBD KAB
13.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB/KR YANG MANDIRI	Rp.	1.126.022.000	APBD KAB
14.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rp.	18.000.000	APBD KAB
15.	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Rp.	5.085.000	APBD KAB
	J U M L A H	Rp	11.016.125.500	

.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan 15 program 49 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp. 11.016.125.500,-. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri Tahun 2018, secara lengkap diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Strategik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yaitu : **“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”**.

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri

Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat;

3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa;
4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-Daerah Lain;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri;
6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang;
7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.

Dari ketujuh Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka misi ke dua, misi ke enam dan misi ketujuh adalah misi yang harus di emban Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri dengan pengendalian penduduk, meningkatkan kualitas hidup anak dan kesetaraan gender.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ikut mengemban misi kedua bersama Perangkat Daerah yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berperan dalam pengendalian penduduk, mengatur kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat wonogiri berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, dengan melaksanakan Misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;

3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk;
2. Peningkatan Kualitas Keluarga;
3. Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak;
4. Meningkatnya kualitas hidup anak;

4. Strategik

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan program KKB PK lini lapangan;
2. Peningkatan kualitas SDM tenaga penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan;
4. Peningkatan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
5. Peningkatan kualitas hidup anak melalui partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak;
6. Penguatan Kelembagaan Anak.

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,27
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	Cakupan KB aktif	Persen	79,70
		Unmetneed	Persen	8,50
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	Persen	6,67
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.060
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak	Persen	60
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Madya

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018

Dalam rencana kinerja tahun 2018 Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,29
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	Cakupan KB aktif	79,60
		Unmetneed	9
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	12,50
		Rasio partisipasi perempuan	0,055
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak	26,67
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumberdaya yang digunakannya.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

- a. Capaian Kinerja Organisasi, dan
- b. Relaisasi Anggaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRETERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRETERIA PENILAIAN
1	Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,29	1,18	503	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP	Cakupan KB Aktif	79,60	78,41	98,50	Sangat Tinggi
		Unmetneed	9	9,40	95,55	Sedang Tinggi
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	12,50	73,13	585	Sangat tinggi
		Rasio partisipasi perempuan	0,055	0,033	60	Rendah
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	26,67	67,74	254	Sangat tinggi
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja				197	Sangat tinggi

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Hingga akhir tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam Renstra Dinas PPKB dan P3A 2016-2021 sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke empat sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :Pengendalian penduduk

1.1. Sasaran-1 :Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk.

Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan -1 Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018		% Capaian Tahun 2018	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2018	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	103,00	0,29	1,18	503	0,27	503

Capaian Kinerja pada indikator untuk sasaran Meningkatkan Pengendalian Laju Penduduk di Kabupaten Wonogiri dapat dicapai melampaui target yang telah ditetapkan (sumber Data dari Data DKB Data Konsolidasi Bersih Dinas Capil) yaitu terealisasi 503% dari target 0,29% pencapaian sebesar 1,18%. Pada indikator ini semakin kecil pencapaian dari target semakin baik, dengan kriteria Sangat Tinggi. Capaian ini terlihat sangat tinggi karena data untuk mengukur indikator ini berubah, data sekarang harus diambil dari Data Konsolidasi Bersih sedangkan penghitungan yang terdahulu menggunakan data pelayanan dan data pelayanan saat ini tidak diperkenankan dipublikasikan untuk kepentingan data, data DKB ini akan kami pakai untuk dasar pengukuran kedepannya. Kalau kita lihat dari capaian sampai triwulan III dengan jenis data yang sama sudah mendekati target yaitu 86,60

% dari target 0,30% realisasi 0,34%. Hal ini dapat dapat mengakibatkan pengukuran laju pertumbuhan penduduk tidak konsisten, yang dapat kami gambarkan sebagaimana grafik di bawah ini;

Grafik Laju pertumbuhan Penduduk tahun 2017 dan 2018



Dari pencapaian indikator kinerja pada Tujuan-1 Sasaran-1 tersebut diatas pada Tahun 2018 di dukung dengan Program Keluarga Berencana dengan Target Anggaran Rp. 7.620.449.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 4.514.573.820,00 atau terealisasi sebesar 59,23%, maka hal ini terjadi efisiensi sebesar 40,74% dan efektifitas dapat dilihat dari pencapaian Kinerja Sasaran -1 sebesar -206% dibandingkan dengan realisasi Anggaran sebesar 59,23% keadaan ini bukan karena tidak adanya kinerja dari OPD Dinas PPKB dan P3A tetapi karena dasar penghitungan capaian kinerja berbeda dikarenakan data jumlah penduduk yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang semula data pelayanan menjadi Data Kependudukan Bersih. Ada beberapa faktor pendukung untuk capaian sasaran -1 yaitu :

1. Sumber Daya Manusia yang ada dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebanyak 73 orang yang terdiri 32 PLKB dan 41 Pembantu PLKB. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 4.
2. Peralatan dan Mesin yang ada dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian kinerja berupa Kendaraan roda 4 yaitu Mobil Pelayanan KB, Mobil

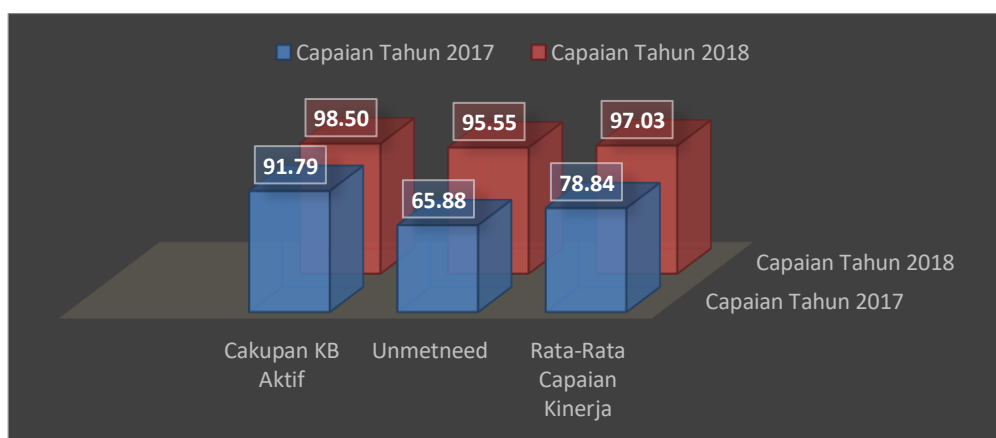
Jemput Antar Calon Akseptor KB, Mobil Penerangan KB 2 unit untuk pemutaran Film dan Promosi Program KB serta kendaraan Roda 2 untuk semua PLKB dan sebagian Pembantu PLKB dalam pelaksanaan Program KB di lini lapangan, termasuk laptop dan printer untuk semua PLKB dan Komputer PC dan printer di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta Bidang Keluarga Sejahtera. Serta pada tahun 2018 ini seluruh PLKB mendapatkan Smartphone sebagai alat penyampaian laporan data di lapangan.

3. Sudah terbangun Gedung Balai Penyuluhan KB di setiap Kecamatan dan 4 (empat) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera serta 2 (dua) Galery Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang digunakan untuk tempat promosi dan penjualan hasil Produksi UPPKS.

Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja tahun 2017 yang tercapai sebesar 103,45%, tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Hal ini dikarenakan penyerapan pelaksanaan pada kegiatan DAK non Fisik (BOKB) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan Sedangkan tingkat Efektifitas yang dicapai tahun 2017 sebesar 110,49% dari realisasi Anggaran sebesar 93,22% dan Efisiensinya sebesar 6,78%

Selanjutnya untuk dapat dilihat pada grafik perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisien pada Capaian Kinerja Sasaran-2 dibawah ini :

Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-1
Tahun 2017 dan Tahun 2018



1.2. Sasaran-2 :Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP.

Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan -1 Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2017		% Capaian Tahun 2018	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2018	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan KB Aktif	91,79	79,60	78,41	98,50	79,70	98,50
2	Unmetneed	65,88	9	9,40	95,55	8,50	95,55
	Rata-Rata Capaian Kinerja	78,84			97,03		

Rata-rata pencapaian pada kedua Indikator Kinerja untuk Sasaran -2 Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP sebesar 97,03%, kondisi seperti ini memiliki korelasi negatif apabila cakupan KB Aktif rendah maka Unmetneed tinggi begitu sebaliknya. Sehingga dapat dilihat kedua indikator tersebut dengan capaian Cakupan KB Aktif yang rendah maka capaian Unmetneed juga rendah, semakin tinggi hasilnya Unmetneed maka semakin rendah tingkat capaiannya. Cakupan Peserta KB Aktif adalah menunjukkan kesertaan masyarakat dalam ber KB, sedangkan Unmetneed adalah menunjukkan prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terlayani. Jika dibandingkan dengan capaian kedua indikator kinerja tahun 2017 pada Sasaran -2 tersebut dengan hasil rata-rata kedua indikator tersebut sebesar 78,84% yang terdiri dari cakupan peserta KB Aktif capaiannya 91,79% dan Unmetneed sebesar 65,88% maka rata-rata capaian kedua indikator tahun 2018 berada lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 18,19%. Hal ini nya pencatatan bukannya tidak berhasil program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Wonogiri tahun 2017 tetapi karena adanya penyesuaian data hasil pendataan yang telah dikoreksi dari BKKBN Pusat terkait pengakuan Peserta KB Baru murni yang selama ini masih ada pengakuan Peserta KB Baru dari Ganti Cara, maka yang ini harus dikeluarkan maka terjadi penurunan pencapaian Cakupan Peserta KB Aktif sedangkan untuk Unmetneed juga

terjadi penyesuaian data yang ada dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih tercatat karena proses koreksi terhenti saat penggunaan sistem informasi pendataan yang baru dari pusat masih terus perbaikan, maka belum terkoreksi jumlah PUS yang seharusnya ada. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap penghitungan yang kumulatif setiap tahunnya. Secara capaian kinerja Sasaran -2 pada tahun 2017 kedua indikator tersebut diatas mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran-2
Tahun 2017 dan Tahun 2018



Sumber Data Hasil Pendataan Keluarga Dinas PPKB dan P3A

Pencapaian Kinerja pada Sasaran-2 dari kedua Indikator Kinerja tersebut rata-rata tercapai sebesar 97,03% didukung oleh Anggaran sebagai berikut :

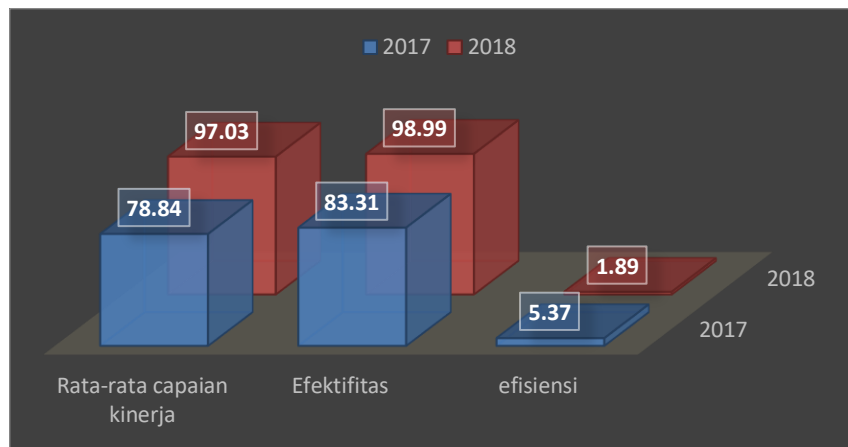
No.	Program	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	65.880.000	62.117.000	94,38	93,38
2.	Program Pelayanan Kontrasepsi	56.305.000	56.110.000	99,65	95,03
3.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.326.022.000	1.108.092.306	83,57	97,07

4.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				86,90
5.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				95,11
6.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS				99,56
7.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	18.000.000	16.103.500	89,46	100
8.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	5.085.000	4.951.500	97,37	99,48
	JUMLAH	1.271.292.000	1.247.375.006	98,11	94,63

Dari data yang ada rata-rata capaian kinerja pada Sasaran-2 sebesar 97,03% yang didukung oleh realisasi anggaran sebesar 98,11% sehingga Efektifitas dicapai sebesar 98,89% dan Efisiensi tercapai sebesar 1,89%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2017 sebesar 78,84% dengan dukungan realisasi anggaran sebesar 94,63% maka Efektifitasnya sebesar 83,31% dan Efisiensinya sebesar 5,37%. Dari perbandingan tersebut kondisi tahun 2018 berada di atas tahun 2017 untuk Efektifitas sedangkan untuk Efisiensi dibawah tahun 2017, hal ini karena pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati.

Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

**Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-2
Tahun 2017 dan Tahun 2018**



2. Tujuan :Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.

2.1. Sasaran-3 :Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan -2 Sasaran -3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2017	Tahun 2018		% Capaian Tahun 2018	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2018	
				Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan		16,70	12,50	73,13	585	66,67	585
2	Rasio partisipasi perempuan		58,00	0,055	0,033	60	0,060	60
	Rata-Rata Capaian Kinerja		37,35			322,5		

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Wonogiri belum dapat dicapai sesuai dengan target.

- Indikator kinerja Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan untuk prosentase capaiannya terlihat sangat tinggi yaitu 585% dari target 12,50 terealisasi 73,13, hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2018 yaitu sebanyak

23 korban jumlah kekerasan terhadap perempuan lebih sedikit dibanding tahun 2017 sebanyak 67 korban.yang menangani.

- Indikator kinerja Rasio Partisipasi Perempuan Capaian indikator sebesar 60,00% dibawah target sebesar 0,050 realisasinya sebesar 0,033, hal ini menunjukan masih rendahnya partisipasi perempuan di Kabupaten Wonogiri bidang lembaga legislatif, pemerintahan maupun swasta dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif yang hanya 4 orang dari jumlah anggota dewan 45 orang. Untuk perempuan yang bekerja di lembaga swasta masih didominasi pada sektor pertokoan dan tenaga buruh pabrik. Jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2017 yang sebesar 58,00% maka terjadi peningkatan capaian sebesar 2,00%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari perbandingan tahun 2018 dengan tahun 2017 sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran-3 Tahun 2017 dan Tahun 2018



Sumber Data dari Data Pilah Gender Kabupaten Wonogiri

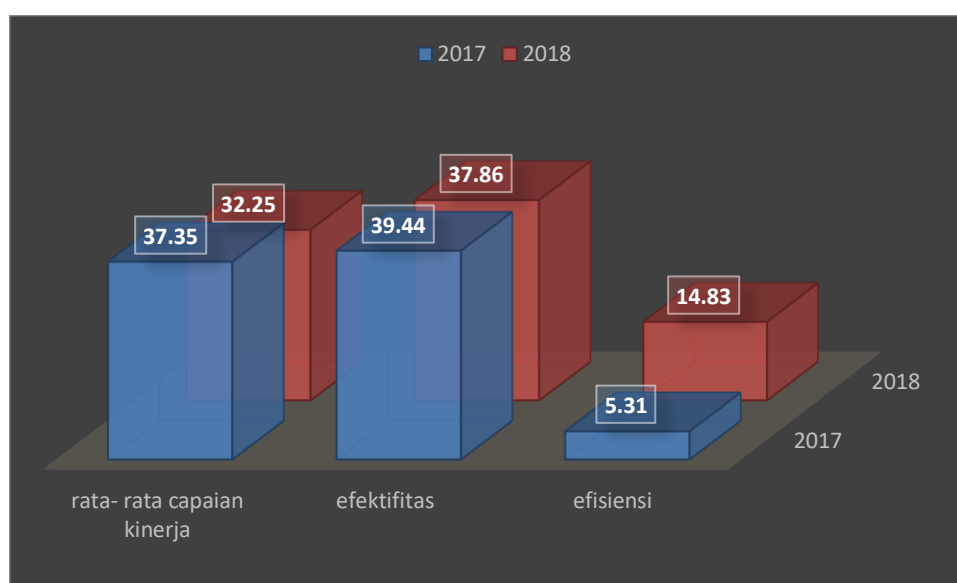
Sedangkan dalam pencapaian target Indikator Kinerja pada Sasaran -3 didukung oleh Anggaran APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Capaian 2018	% Capaian 2017
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	396,576.000	338.472.340	85,35	
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	9.000.000	9.000.000	100	99,79
3.	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	59.094.000	48.302.156	81,74	93,62
	JUMLAH	464.670.000	395.774.496	85,17	94,69

Dalam pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran-3 dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 322,5% didukung dengan Realisasi anggaran sebesar 85,17% maka Efektifitasnya sebesar 378,6% dan Efisiensi terjadi sebesar 14,83%. Dan jika dibandingkan dengan Efektifitas yang dicapai tahun 2017 dari capaian kinerja 37,35% didukung dengan anggaran 2017 sebesar 94,69% maka efektifitasnya sebesar 39,44% dan Efisiensi sebesar 5,31%. Sehingga dapat disimpulkan kondisi tahun 2018 dari kondisi 2017 yang jauh lebih Efektif walaupun Efisien lebih tinggi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Grafik perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Efektifitas dan Efisiensi yang dicapai tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut :

**Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja
Sasaran-3 Tahun 2017 dan Tahun 2018**



2.2. Sasaran-4 :Meningkatnya kualitas hidup anak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan - 2 Sasaran -4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2017		% Capaian Tahun 2017	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2017	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	-13,64	26,67	67,74	254	60	254
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	100,00	Madya	Pratama
	Rata-Rata Capaian Kinerja	-			177		

Indikator kinerja pada Sasaran -4 Meningkatnya kualitas hidup anak rata-rata tercapai sebesar 177%, hal ini karena pada indikator kinerja Persentase penurunan kekerasan terhadap anak tercapai sebesar 67,74% dari target sebesar 26,67% terealisasi sebesar 254% yang menunjukkan penurunan prosentase kekerasan terhadap anak Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017 dibanding tahun 2018 hal ini

terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 sebanyak 62 korban sedangkan tahun 2018 sebanyak 20 korban. Diharapkan untuk tahun kedepan akan semakin menurun jumlah kekerasan terhadap anak dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan korban kekerasan terhadap anak melalui Satgas Perlindungan Anak yang telah dibentuk mulai dari Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten .

Dari Sasaran-4 pada indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak secara perhitungan hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 dengan tingkat capaian Pratama, hitungan Kabupaten Wonogiri.

Dukungan realisasi Anggaran tahun 2018 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Program	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Capaian 2018	% Capaian 2017
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	50.400.000	48.302.156	95,84	94,12
	JUMLAH	50.400.000	48.302.156	95,84	94,12

Dari Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran-4 sebesar 254% yang didukung oleh realisasi anggaran sebesar 95,84% maka Efektifitasnya sebesar 265% dan Efisiensinya sebesar 4,16%. Pada Sasaran-4 ini dibanding tahun 2017 lebih meningkat capaiannya walaupun pada tahun 2017 ada 2 program yang mendukung.

Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-4 Tahun 2017 dan Tahun 2018 .

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

No.	Program	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	% Capaian 2018	% Capaian 2017
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.392.068.500	1.376.070.645	98,85	97,41

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.825.000	123.598.131	98,23	93,60
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.241.000	11.057.810	90,33	86,80
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.500.000	21.975.000	97,67	98,58
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.681.000	54.116.630	95,48	99,26
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	50.400.000	48.302.156	95,84	94,12
7.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	396.576.000	338.472.340	85,35	89,35
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	9.000.000	9.000.000	100	99,79
9.	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender	59.094.000	56.446.730	95,52	93,62

	Dalam Pembangunan				
10.	Program Keluarga Berencana	7.620.449.000	4.562.709.020	59,87	93,22
11.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	65.880.000	61.707.000	93,67	93,38
12.	Program Pelayanan Kontrasepsi	56.305.000	56.110.700	99,65	95,03
13.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.126.022.000	1.108.062.806	98,41	97,07
14.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				86,90
15.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				95,11
16.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS				99,56
17.	Program Pengembangan Bahan Informasi	18.000.000	16.103.500	89,46	100

	Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				
No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2018	% Capaian 2017
18.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	5.085.000	4.951.500	97,37	99,48
	JUMLAH	11.016.126.500	7.848.683.968	71,25	91,22

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran kinerja yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan **SANGAT RENDAH** atau rata-rata -54,48% dari Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-1 sebesar -206% dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-2 sebesar 97,03% sedangkan Rata-rata Capaian Kinerja urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rata-rata tercapai 249,75% dengan kategori **SANGAT TINGGI** dari Sasaran-3 sebesar 322,5% dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-4 sebesar 177% apabila dihitung rata rata capaian sasaran pada tahun 2018 sebesar 197 % dengan kategori **SANGAT TINGGI**.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat agar berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara keseluruhan Indikator Sasaran yang dicapai Rata-rata Capaian Kinerjanya sebesar 197% maka dapat dikategorikan dalam kategori **SANGAT TINGGI**, hal ini karena dipengaruhi oleh rata-rata pencapaian Sasaran pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar -54,48% , walaupun sangat rendah tetapi pada rata-rata pencapaian Sasaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 279,75%. Hal ini didukung data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicapai sebesar rata-rata sebesar -54,48%. Sedangkan Hasil Pengukuran Anggaran tercapai 65,34% dari Target Anggaran. Sedangkan Pengukuran Kinerja pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercapai sebesar rata-rata 279,75%. Sedangkan Pengukuran Anggaran tercapai 87,80% dari Target Anggaran.
2. Terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 tetapi efisiensi ini semata –mata bukan karena penghematan tetapi ada anggaran yang tidak dapat terserap dari perencanaan anggaran yang disebabkan beberapa hal :

- a. Juknis dari Pusat datangnya terlambat, sehingga kegiatan BOKB penyerapannya sangat rendah.
- b. Permohonan Uang Persediaan belum memenuhi besaran Anggaran yang ada di Dinas PPKB dan P#A Kab Wonogiri.
- c. Indeks harga yang ditetapkan pada lampiran rincian BOKB dari pusat sangat tinggi, berbeda dengan indeks harga di Daerah sehingga sangat mempengaruhi penyerapan.
- d. Kekosongan Pengguna Anggaran hampir satu setengah bulan yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Hal diatas mengakibatkan efisiensi anggaran sangat tinggi sebesar 28,76% yang terlihat dari besaran anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 11.016.126.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.848.683.968,- atau terealisasi sebesar 71,24% dengan realisasi fisik 85,33%.

3. Penggunaan Anggaran Gaji dan Tunjangan terdapat Efisiensi sebesar 53,42% atau sebesar Rp. Rp2.695.567.057,- .Hal ini semata mata bukan karena efisiensi tetapi karena penganggaran gaji masih memuat anggaran gaji untuk petugas lapangan PLKB yang sudah menjadi pegawai pusat, sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran sangat rendah.

B. Strategi Perencanaan Masa Mendatang

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pencapaian sasaran baik pada Renstra Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021 maupun pengukuran RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut diatas perlu diambil Strategi untuk meningkatkan kinerja tahun yang akan datang anrta lain sebagai berikut :

- A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak secara rutin perlu dilakukan dan pelibatan anak dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan monev;
 2. Meningkatkan kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di masyarakat;

3. Memberikan fasilitasi kegiatan Forum Anak Seluruh Wonogiri bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 4. Mengaktifkan atau memberdayakan satgas Perlindungan Anak tingkat desa atau kelurahan
 5. Peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungannya, khususnya anak yang ditinggal orang tuanya merantau.
 6. Pemetaan Tempat-tempat Rawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang MIRAS.
 8. Wajib belajar 12 tahun.
 9. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan;
- B. Urusan Waib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
1. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
 2. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta meningkatkan memberikan bantuan operasional setiap bulan.
 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala.
- Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prioritas kegiatan yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:
1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada OPD terkait dan masyarakat semua lapisan.
 2. Melakukan upaya penerapan Pengarus Utamaan Gender mulai dari Perencanaan, Implementasi Anggaran dan Monitoring Evaluasi serta Pelaporan pada semua OPD dan kegiatan Sosial, Politik, dan Keagamaan yang ada di masyarakat.

3. Mendorong Forum Anak untuk dapat memberikan suara anak dalam kegiatan perencanaan pembangunan sehingga dapat terakomodasi apa yang menjadi kebutuhan anak dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kegiatan forum anak serta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak guna mewujudkan pengembangan kota layak anak.

Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
2. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu